

AMERIKA SERIKAT AJUKAN PERPANJANGAN EMBARGO SENJATA KEPADA DK PBB TERHADAP IRAN

Amanda Jasmine¹, Yuniarti²✉

^{1,2}Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.
✉Corresponding author: yuniarti@fisip.unmul.ac.id

Article history

Received 2024-03-10 | Accepted 2024-03-15 | Published 2024-05-25

Abstrak

Pada tahun 2020, Amerika Serikat mengusulkan perpanjangan embargo senjata kepada Dewan Keamanan PBB terhadap Iran, namun usulan ini ditolak karena Iran dianggap mematuhi perjanjian JCPOA. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan AS mengusulkan perpanjangan tersebut. Tuduhan utama AS terhadap Iran adalah mendukung kelompok teroris di Timur Tengah, termasuk di Yaman dan Suriah. AS khawatir jika embargo dicabut, Iran akan bebas memasok senjata, yang dapat memperburuk konflik di Venezuela, Suriah, dan Afghanistan. Penelitian ini menggunakan metode eksplanasi dengan pengumpulan data melalui tinjauan pustaka dan analisis kualitatif. Teori yang diterapkan adalah teori kepentingan nasional oleh Donald E. Nuechterlein. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan AS untuk mengusulkan perpanjangan embargo didasarkan pada empat aspek kepentingan nasional: pertahanan tanah air, kesejahteraan ekonomi, tatanan dunia yang menguntungkan, dan promosi nilai-nilai. AS berusaha melindungi tanah airnya, mencegah ancaman dari industri senjata Iran, mempertahankan supremasi di Timur Tengah, dan menjaga stabilitas ideologi, khususnya di kawasan tersebut.

Kata Kunci: Amerika Serikat, Embargo, Iran, Kepentingan Nasional.

U.S. SUBMITS ARMS EMBARGO EXTENSION TO UN UNSC AGAINST IRAN

Abstract

In 2020, the United States proposed extending the arms embargo on Iran to the UN Security Council, but the proposal was rejected due to Iran's compliance with the JCPOA. This study explores the reasons behind the U.S. proposal, which were primarily based on accusations that Iran supports terrorist groups in the Middle East, including in Yemen and Syria. The U.S. feared that lifting the embargo would allow Iran to supply weapons, potentially exacerbating conflicts in Venezuela, Syria, and Afghanistan. Using explanatory research and qualitative analysis, the study applies Donald E. Nuechterlein's national interest theory. The results show that the U.S. rationale for the extension was driven by four key national interests: homeland defense, economic well-being, maintaining a favorable world order, and promoting values. The U.S. aimed to protect its homeland, prevent threats to its markets, preserve regional supremacy, and uphold ideological stability, especially in the Middle East.

Keywords: United States, Embargo, Iran, National Interest

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Copyright © 2024 Amanda Jasmine, Yuniarti

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 1950-an, Iran memulai pengembangan energi nuklir sebagai bentuk alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi yang tidak dapat dipenuhi hanya dengan energi fosil (Alcaff, 2008). Program ini resmi dimulai pada masa pemerintahan Shah Reza Pahlevi pada tahun 1957. Sejak awal, tujuan pengembangan nuklir Iran adalah untuk memenuhi kebutuhan energi domestik. Namun, mengingat potensi nuklir sebagai senjata, Iran melakukan berbagai upaya untuk meyakinkan dunia internasional bahwa program ini bertujuan damai, salah satunya dengan bergabung ke dalam International Atomic Energy Agency (IAEA) pada tahun 1959 dan menandatangani Non-Proliferation Treaty (NPT). Namun pada 2003, di bawah kepemimpinan Khatami, Iran gagal memenuhi ketentuan NPT. Iran dianggap membatasi pengawasan IAEA dan tidak melaporkan seluruh kegiatan nuklirnya. Hal ini mendorong IAEA untuk menerapkan protokol tambahan, di mana Iran setuju untuk memberikan keterangan rinci dan akses penuh kepada IAEA untuk memeriksa fasilitas nuklirnya. Ketika Mahmoud Ahmadinejad menjadi presiden pada tahun 2005, Iran memperluas produksi uranium tanpa sepengetahuan IAEA, yang mengarah pada pemberian sanksi ekonomi dan embargo senjata oleh Dewan Keamanan PBB dan Amerika Serikat. Sanksi tersebut bertujuan untuk menghentikan pengembangan senjata nuklir oleh Iran, dengan larangan bagi negara-negara lain untuk terlibat dalam industri nuklir Iran, termasuk penyediaan bahan dan teknologi nuklir (Stockholm International Peace Research Institute, 2021). Namun, Iran terus melanjutkan program nuklirnya, yang menyebabkan kecaman internasional. Sanksi PBB sendiri diberlakukan sampai 4 putaran yang diterapkan pada resolusi-resolusi berikut.

Tabel 1. Resolusi-Resolusi Pemberian Sanksi terhadap Iran

Nomor Resolusi	Isi	Tahun Pengesahan
1737	Larangan pasokan teknologi dan bahan terkait nuklir serta pembekuan aset individu dan perusahaan yang terkait dengan pengayaan uranium.	2006
1747	Memaksakan embargo senjata dua arah terhadap Iran dan meningkatkan pembekuan aset yang sudah ada	2007
1803	Menghancurkan Iran menghentikan setiap aktivitas baik penelitian dan pengembangan terkait dengan sentrifugal dan pengayaan uranium	2008
1929	Iran tidak diperbolehkan berurusan dengan negara lain yang berkaitan dengan penambangan, produksi, serta pemakaian bahan dan teknologi nuklir.	2010

Sumber: United Nations, tersedia pada un.org.

Selain sanksi dari PBB tersebut, AS melarang bank AS untuk menyalurkan dana baik dari atau ke Iran. Pada 2010, AS memberlakukan larangan penanaman modal investasi oleh bank AS kepada sektor usaha minyak di Iran dan pada tahun 2011, juga pembekuan aset lembaga keuangan asing yang bekerjasama dalam perdagangan bensin dengan bank sentral Iran. Sanksi ekonomi yang diberlakukan memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian Iran, seperti penurunan harga minyak dan inflasi yang mencapai 80% pada tahun 2012. Meskipun demikian, Iran tetap tidak menghentikan program pengayaan uranium, bahkan memperluas kapasitasnya secara signifikan. Pada tahun 2013-2015, negara-negara P5+1 (Amerika Serikat, Cina, Rusia, Inggris, Prancis, dan Jerman) mengadakan negosiasi intensif dengan Iran, yang akhirnya menghasilkan kesepakatan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada tahun 2015. Kesepakatan ini mengharuskan Iran untuk mengurangi kadar pengayaan uranium, menghentikan pembangunan fasilitas baru, dan menutup reaktor yang berpotensi menghasilkan plutonium. Sebagai imbalan-nya, sanksi ekonomi terhadap Iran akan dicabut secara bertahap. Namun, pada tahun 2018, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menarik Amerika Serikat dari JCPOA, dengan alasan bahwa perjanjian tersebut tidak cukup untuk melindungi kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya dari ancaman nuklir Iran. Setelah penarikan tersebut, Amerika Serikat kembali menerapkan sanksi ekonomi yang ketat terhadap Iran, meskipun IAEA melaporkan bahwa Iran tetap mematuhi kesepakatan JCPOA.

Meskipun embargo senjata PBB terhadap Iran seharusnya berakhir pada Oktober 2020 sesuai dengan JCPOA, Amerika Serikat mengusulkan perpanjangan embargo tersebut. Amerika Serikat berargumen bahwa Iran mendukung kelompok terorisme di Timur Tengah dan jika embargo dicabut, Iran akan semakin bebas memperpanjang konflik di wilayah tersebut (Nichols, 2020). Usulan ini mendapat penolakan internasional, terutama karena Amerika Serikat sudah tidak menjadi bagian dari JCPOA dan Iran dinilai telah mematuhi perjanjian yang ada. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan alasan Amerika Serikat mengusulkan resolusi perpanjangan embargo senjata kepada Iran tahun 2020.

Teori Kepentingan Nasional

Dalam penelitian ini, untuk memahami alasan Amerika Serikat mengajukan perpanjangan embargo senjata terhadap Iran pada tahun 2020, digunakan teori kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Donald E. Nuechterlein. Menurut Nuechterlein, kepentingan nasional adalah persepsi kebutuhan dan keinginan suatu negara dalam hubungannya dengan lingkungan eksternalnya, yang terdiri dari negara-negara berdaulat lainnya. Persepsi ini ditentukan melalui proses politik oleh pemimpin negara berdasarkan pertimbangan kondisi atau krisis eksternal yang dapat mempengaruhi kemaslahatan negara. Teori ini berlaku khususnya untuk negara berdaulat, bukan organisasi internasional. Nuechterlein mengklasifikasikan kepentingannasional menjadi empat kategori dasar:

Defense of Homeland: Kepentingan untuk melindungi wilayah, warga negara, dan konstitusi dari ancaman fisik yang dilakukan oleh negara lain atau entitas internal.

Economic Well-being: Kepentingan dalam meningkatkan standar hidup warga negara melalui hubungan perdagangan internasional yang menguntungkan.

Favorable World Order: Kepentingan dalam menciptakan tatanan dunia politik dan ekonomi yang stabil dan menguntungkan bagi negara.

Promotion of Values: Kepentingan untuk mempertahankan dan mempromosikan ideologi negara, seperti promosi demokrasi oleh negara-negara Barat.

Selain itu, Nuechterlein membagi tingkat intensitas ancaman terhadap kepentingan nasional menjadi empat kategori:

Survival: Ancaman terhadap eksistensi negara.

Vital: Kerugian serius yang memerlukan tindakan keras, termasuk penggunaan militer.

Major: Pengaruh signifikan pada politik, ekonomi, dan ideologi negara yang memerlukan tindakan pencegahan.

Peripheral: Kondisi yang tidak langsung mempengaruhi negara, tetapi tetap relevan bagi kepentingan domestik tertentu.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode eksplanatif dengan memanfaatkan data sekunder dari buku, jurnal, dan artikel yang diakses melalui internet. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (library research) dan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif oleh Miles dan Huberman, yang melibatkan tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994. Hal. 10-11).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan Amerika Serikat Mengajukan Perpanjangan Embargo Senjata Kepada Dk Pbb Terhadap Iran Tahun 2020

Sejak bom atom pertama diledakkan pada 1945, perkembangan senjata nuklir dunia telah mengalami kemajuan pesat. Banyak negara mulai aktif mengembangkan senjata nuklir, termasuk

Iran, yang berkontribusi pada perkembangan teknologi nuklir global. Program nuklir Iran dimulai pada 1957 dengan partisipasi dalam program Atom for Peace Amerika Serikat di bawah Presiden Dwight D. Eisenhower. Pada tahun 1967, Iran mendirikan The Tehran Nuclear Research Center (TNRC) dengan bantuan AS, yang dilengkapi dengan reaktor nuklir. Meski demikian, kerjasama ini dibatasi, dan Iran tidak diizinkan untuk mengoperasikan reaktor secara langsung. Iran menandatangani Perjanjian Non-Proliferation Treaty (NPT) pada 1968 dan meratifikasinya pada 1970, yang mendorong penggunaan teknologi nuklir untuk keperluan damai dan pengawasan oleh IAEA. Namun, setelah Revolusi Islam Iran 1979, banyak proyek nuklir terhenti atau terbengkalai karena pergolakan politik dan perang dengan Irak. Setelah revolusi, Iran mencari mitra baru untuk melanjutkan program nuklirnya. Namun, banyak kerjasama yang dibatalkan karena tekanan dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Pada tahun 1990, Iran akhirnya bekerja sama dengan Rusia untuk menyelesaikan pembangunan reaktor nuklir Bushehr yang terhambat. Di bawah Presiden Mohammad Khatami pada tahun 1997, Iran melanjutkan pengembangan nuklirnya dengan membangun fasilitas di berbagai lokasi dan menempatkan tambang uranium di dalam negeri. Pada 11 Februari 2003, Iran menunjukkan kemampuannya dalam memperkaya uranium. Namun, pada tahun yang sama, IAEA menemukan pelanggaran teknis terhadap NPT dan meminta Iran untuk menandatangani protokol tambahan guna memberikan akses penuh untuk inspeksi. Iran akhirnya menandatangani protokol tersebut pada 18 Desember 2003, tetapi kemudian membatasi akses IAEA.

Di bawah kepemimpinan Mahmoud Ahmadinejad yang dimulai pada tahun 2005, Iran melanjutkan pengembangan nuklirnya dan membuka kembali fasilitas yang sebelumnya disegel. Ini menimbulkan tekanan internasional dan serangkaian resolusi dari PBB, termasuk:

Resolusi DK PBB No. 1737 (2006), yang memberikan sanksi terkait pengembangan nuklir Iran dan melarang pasokan teknologi serta material nuklir.

Resolusi DK PBB No. 1747 (2007), yang memperkenalkan embargo senjata dan meningkatkan pembekuan aset.

Resolusi DK PBB No. 1803 (2008), yang mengharuskan Iran menghentikan pengayaan uranium dan penelitian terkait.

Resolusi DK PBB No. 1929 (2010), yang melarang Iran terlibat dalam kegiatan komersial nuklir dan senjata konvensional berat.

Menanggapi sanksi ini, Iran mengancam akan menggunakan ekspor minyak sebagai alat untuk mempertahankan diri. Meskipun sanksi PBB bertujuan membatasi pengembangan nuklir Iran, negara tersebut terus melanjutkan programnya, mendorong komunitas internasional untuk mencari solusi diplomatik untuk menyelesaikan perselisihan ini.

Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)

Dalam merespons perkembangan teknologi nuklir Iran, Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan beberapa resolusi untuk membatasi aktivitas nuklir Iran. Resolusi-resolusi ini termasuk:

Resolusi No. 1737 (2006): Mengatur sanksi dan pembatasan pada aktivitas nuklir Iran.

Resolusi No. 1747 (2007): Menambah sanksi dan pembatasan, termasuk larangan terhadap perdagangan senjata.

Resolusi No. 1803 (2008): Memperketat sanksi dengan penambahan langkah-langkah pengawasan.

Resolusi No. 1929 (2010): Menerapkan sanksi tambahan dan melarang aktivitas pengayaan uranium lebih lanjut.

Namun, resolusi-resolusi ini tidak menghentikan Iran dari melanjutkan pengembangan nuklirnya. Untuk mengatasi masalah ini, Amerika Serikat mengundang negara-negara EU3 (Inggris, Prancis, Jerman) yang sebelumnya terlibat dalam negosiasi dengan Iran untuk bergabung dengan P5+1 (Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, China, dan Jerman) untuk mencapai kesepakatan yang komprehensif.

Hasilnya adalah JCPOA yang disahkan melalui Resolusi DK PBB No. 2231 (2015). JCPOA mengatur hal-hal berikut:

Pembatasan Pengayaan Uranium: Pembatasan pada pengayaan uranium hexafluoride selama 8 tahun pertama, dengan perubahan aktivitas pengayaan untuk tujuan damai.

Kapasitas Uranium: Iran hanya dapat menyimpan 300 kg uranium dengan kadar 3,67% selama 15 tahun.

Reaktor Arak: Reaktor nuklir di Arak akan dibangun kembali untuk tidak menghasilkan plutonium tingkat senjata.

Larangan Pembangunan Reaktor Baru: Selama 15 tahun, Iran tidak boleh membangun reaktor nuklir baru; bahan bakar dapat diperoleh melalui kerjasama internasional.

Pengawasan IAEA: IAEA akan mengawasi kepatuhan Iran terhadap JCPOA dan melaporkan kepada DK PBB.

Pencabutan Sanksi: Pencabutan sanksi DK PBB (No. 1696, 1737, 1747, 1803, 1929) tergantung pada kepatuhan Iran terhadap JCPOA.

JCPOA bertujuan mengurangi dan membatasi kemampuan Iran dalam mengembangkan teknologi nuklir yang berpotensi menjadi senjata nuklir. Perjanjian ini memberikan waktu lebih lama bagi Iran untuk menghasilkan bahan fisi nuklir yang cukup, sambil memastikan bahwa teknologi nuklir digunakan untuk tujuan damai (Belfer Center for Science and International Affairs, 2015).

Implementasi JCPOA oleh Iran

Pada 18 Oktober 2015, Iran mulai mengimplementasikan JCPOA dengan langkah-langkah untuk membatasi pengembangan teknologi nuklirnya, sesuai kesepakatan yang diawasi oleh P5+1 (AS, Inggris, Prancis, China, Rusia, Jerman) dan IAEA. Laporan IAEA dari 2016 hingga 2018 menunjukkan bahwa meskipun Iran beberapa kali melampaui batas stok air berat, mereka tetap mematuhi batas pengayaan uranium dan ketentuan transparansi. Iran juga berkomitmen untuk mengirim-kan kelebihan air beratnya ke pasar internasional, menjaga level pengayaan uranium di bawah 3,67%, dan menerima inspektor tambahan dari IAEA.

Setelah IAEA menyatakan kepatuhan Iran terhadap JCPOA, DK PBB mencabut sanksi, termasuk embargo senjata yang diatur dalam Resolusi 1747 Tahun 2007. Namun meski Iran mematuhi kesepakatan, AS di bawah Presiden Donald Trump pada 8 Mei 2018 memutuskan menarik diri dari JCPOA, menuduh Iran melanggar Resolusi DKPBB No. 1929 terkait uji coba balistik nuklir pada 2015. Keputusan AS ini dikecam oleh negara-negara lain yang berpartisipasi dalam JCPOA, sementara Uni Eropa tetap berkomitmen melanjutkan kesepakatan jika Iran terus bekerja sama dengan damai.

Mundurnya Amerika Serikat dari JCPOA

Meskipun DK PBB telah mencabut sanksi terhadap Iran sebagai bagian dari implementasi JCPOA, kekhawatiran Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran tetap ada. Pada 8 Maret 2016, AS menuduh Iran melakukan uji coba rudal balistik nuklir meskipun telah menyepakati JCPOA, yang memicu kecemasan di Timur Tengah, terutama Israel. Pada 2017, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menuduh Iran membangun fasilitas nuklir di Suriah dan Lebanon (The Guardian, 2016). Kendati demikian, tuduhan tersebut tidak pernah dikonfirmasi oleh IAEA melalui laporan rutin yang diberikannya saat menjadi pengawas Iran di bawah kesepakatan JCPOA.

Sesuai JCPOA, jika Iran mematuhi ketentuan yang ada, sanksi yang dijatuhkan oleh DK PBB, seperti dalam Resolusi 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), dan 1929 (2010), akan dicabut. Namun, pencabutan sanksi ini ditentang oleh AS, yang menganggapnya sebagai ancaman. Pada 8 Mei 2018, Presiden Donald Trump mengumumkan penarikan AS dari JCPOA, menyebut kesepakatan tersebut cacat dan menyatakan bahwa Iran dapat memperoleh senjata nuklir jika tidak ada tindakan

lanjutan. Trump juga memerintahkan penerapan kembali sanksi ekonomi yang keras terhadap Iran dan mengancam negara lain yang membantu Iran.

Setelah penarikan resmi AS, ketegangan meningkat. AS mengajukan rancangan perpanjangan sanksi melalui DK PBB pada 12 Agustus 2020, yang termasuk penerapan kembali Resolusi 1747 (2007) yang membatasi perdagangan senjata Iran. Namun, rancangan ini ditolak oleh DK PBB, yang menyatakan bahwa AS tidak lagi memiliki wewenang untuk mengajukan keberatan setelah keluar dari JCPOA (Morello & De Young, 2020). Negara-negara partisipan lainnya, termasuk Uni Eropa, Rusia, dan China, mengecam tindakan sepihak AS dan berusaha mempertahankan JCPOA, menentang perpanjangan embargo terhadap Iran.

Alasan Amerika Serikat Mengusulkan Resolusi Perpanjangan Embargo Senjata kepada DK PBB terhadap Tahun 2020

Amerika Serikat mengusulkan resolusi perpanjangan embargo senjata kepada Dewan Keamanan PBB pada tahun 2020 dengan tujuan membatasi program pengembangan nuklir Iran. Hubungan antara kedua negara mulai memburuk setelah Revolusi Iran 1979, yang membuat Amerika Serikat semakin khawatir terhadap potensi ancaman dari teknologi nuklir yang dikembangkan oleh Iran. Untuk membatasi pengembangan ini, Amerika Serikat turut serta dalam pemberian sanksi seperti Resolusi DK PBB No. 1747 tahun 2007.

Keterlibatan Amerika Serikat dalam kesepakatan JCPOA, yang mengharuskan pencabutan sanksi jika Iran memenuhi ketentuan tertentu, tidak menghilangkan kekhawatiran AS terhadap ancaman dari teknologi nuklir Iran. Kekhawatiran ini akhirnya mendorong Amerika Serikat untuk menarik diri dari JCPOA dan mengusulkan perpanjangan sanksi, termasuk pembatasan jual beli senjata oleh Iran, untuk memastikan bahwa Iran tidak menggunakan teknologi nuklirnya untuk tujuan yang berbahaya. Berdasarkan teori kepentingan nasional Donald E. Nuechterlein, kepentingan Amerika Serikat dalam mengusulkan perpanjangan embargo ini terletak pada aspek defense of homeland, economic well-being, favorable world order dan promotion of values.

Defense of Homeland: Mengamankan fisik, ekonomi, dan sekutu Amerika Serikat

Pertahanan tanah air sendiri meliputi segala upaya Amerika Serikat dalam melindungi keamanan fisik, ekonomi, dan infrastruktur kritis negara dari ancaman eksternal dan internal. Oleh sebab itu dengan adanya perpanjangan embargo senjata terhadap Iran merupakan salah satu upaya Amerika Serikat agar dapat melindungi pertahanan tanah airnya. Potensi penggunaan senjata nuklir oleh Iran dapat mengancam keamanan nasional AS, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan memicu ketidakstabilan regional dan risiko proliferasi nuklir di Timur Tengah. Ancaman langsung muncul dari potensi penggunaan senjata nuklir oleh Iran, yang dapat mengakibatkan kehancuran besar dan kehilangan nyawa jika digunakan terhadap Amerika Serikat atau sekutunya.

Walau kemungkinan serangan langsung terhadap Amerika Serikat tidak berdampak banyak karena letak geografis yang berjauhan, keberadaan senjata nuklir di tangan Iran dapat memicu ketidakstabilan regional yang signifikan. Ancaman tidak langsung termasuk risiko proliferasi nuklir, di mana negara-negara lain di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Turki, dan Mesir mungkin merasa terdorong untuk mengembangkan senjata nuklir mereka sendiri sebagai respons terhadap program nuklir Iran. Ancaman ini juga melibatkan keamanan sekutu AS di kawasan, seperti Israel, yang merasa terancam oleh kemungkinan Iran memiliki senjata nuklir, yang dapat mendorong militerisasi lebih lanjut di wilayah tersebut.

Selain itu, program nuklir Iran berdampak pada keamanan ekonomi dan infrastruktur kritis Amerika Serikat, mengingat Timur Tengah merupakan penghasil minyak utama dunia. Ketidakstabilan di kawasan ini berpotensi mengganggu pasokan minyak global, yang dapat memicu lonjakan harga dan mengganggu stabilitas ekonomi AS. Iran juga memiliki kemampuan untuk mengganggu jalur suplai energi penting, seperti Selat Hormuz, yang merupakan titik kritis

bagi pengiriman minyak global, serta kemampuan dalam melakukan serangan siber terhadap infrastruktur vital AS.

Akhirnya, kredibilitas dan kapasitas deterrence Amerika Serikat dipertaruhkan dalam menangani program nuklir Iran. Kegagalan AS untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir dapat merusak kredibilitasnya sebagai kekuatan global yang mampu menegakkan rezim non-proliferasi, dan dapat memperlemah posisi strategisnya di panggung dunia. Oleh karena itu, program nuklir Iran menjadi isu yang signifikan bagi keamanan nasional AS, yang mendorong negara ini untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran sebagai upaya mempertahankan pertahanan tanah air.

Economic Well-Being: Mengamankan Pasar Senjata Amerika Serikat

Pada tahun 2020, Amerika Serikat mengusulkan perpanjangan embargo senjata terhadap Iran karena kepentingan untuk menjaga dominasi pasar senjatanya dan membatasi aktivitas jual beli senjata oleh Iran. Sebagai salah satu ekonomi terbesar dunia, Amerika Serikat menggunakan kekuatan ekonominya untuk mempengaruhi kebijakan internasional, termasuk melalui industri perdagangan senjata, yang sangat menguntungkan. (Shah, 2013) Perdagangan senjata global dipandang oleh Amerika Serikat sebagai cara untuk meningkatkan keamanan negaranya dan memperkuat sekutu-sekutunya. Kebijakan ini diatur dalam Arms Export Control Act (AECA), yang memberi Presiden AS wewenang untuk mengendalikan ekspor senjata berdasarkan pertimbangan hak asasi manusia, keamanan regional, dan lainnya. (AECA, 2022)

Amerika Serikat adalah eksportir senjata terbesar dunia, dengan mitra ekspor termasuk negara-negara NATO, Timur Tengah, dan Asia Timur. Pada tahun 2020, penjualan senjata AS mencapai \$285 miliar, mengokohkan posisinya sebagai pemasok utama senjata global, dengan negara-negara seperti Arab Saudi, Mesir, dan Israel menjadi mitra penting. Hal ini dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1. Daftar Negara Eksportir Senjata Amerika Serikat (Dalam Juta Dollar AS)

No.	Negara	Total Penjualan	No.	Negara	Total Penjualan
1	Kuwait	2,014	16	Selandia Baru	130
2	Arab Saudi	1,320	17	Jerman	124
3	Qatar	1,302	18	Denmark	113
4	Jepang	1,224	19	Romania	109
5	Ukraina	917	20	Spanyol	86
6	Inggris	724	21	Kanada	58
7	Australia	714	22	Kroasia	29
8	Uni Emirat Arab	557	23	Turki	25
9	Israel	422	24	Yordania	23
10	Korea Selatan	408	25	Iraq	11
11	Bahrain	359	26	Perancis	10
12	Singapura	266	27	Mesir	7
13	India	219	28	Lebanon	5
14	Italia	214	29	Tunisia	3
15	Taiwan	140	30	Rusia	1

Sumber: Statista (2022).

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan Amerika Serikat melalui perdagangan senjata memberikan dampak positif terhadap perekonomian negaranya. Hal ini terlihat dari berbagai kerjasama ekspor senjata yang dilakukan Amerika Serikat dengan banyak negara. Selain itu, dengan nilai pasar senjata global yang terus meningkat, Amerika Serikat berupaya mempertahankan posisinya sebagai produsen senjata terbesar di dunia.

Di sisi lain, Iran juga pernah menjadi salah satu importir utama dalam perdagangan senjata global. Pada periode 1950 hingga 1979, Iran menjadi salah satu mitra kerjasama penting dan importir

terbesar senjata dari Amerika Serikat. Ekspor senjata AS ke Iran terus meningkat dan mencapai puncaknya pada tahun 1977, sebagaimana tercermin dalam data yang disajikan berikut.

Tabel 2. Total Ekspor Persenjataan Amerika Serikat ke Iran 1953-1979 (Dalam Jual Dollar AS)

No.	Tahun	Total Penjualan	No.	Tahun	Total Penjualan
1	1953	1	8	1967	179
2	1955	110	9	1969	1,141
3	1957	53	10	1971	1,134
4	1959	94	11	1973	1,324
5	1961	107	12	1975	4,038
6	1963	137	13	1977	4,445
7	1965	182	14	1979	214

Sumber: The World (2016).

Berdasarkan data di atas, terlihat adanya hubungan dekat antara Amerika Serikat dan Iran selama periode 1953-1979 di bawah kepemimpinan Dinasti Pahlevi. Puncak hubungan ini terjadi pada tahun 1979, ketika Amerika Serikat menjual senjata senilai \$4,4 juta kepada Iran. Namun, hubungan kedua negara mulai merenggang setelah revolusi Islam 1979 yang menggulingkan Dinasti Pahlevi dan menggantinya dengan kepemimpinan Ayatollah Khomeini. Perubahan kepemimpinan ini menandai awal runtuhnya aliansi antara Amerika Serikat dan Iran, yang kemudian mengarah pada dominasi Rusia dan China sebagai eksportir utama senjata untuk Iran dari tahun 1980 hingga kini (The World, 2016).

Dengan merenggangnya hubungan dengan Amerika Serikat, Iran fokus pada pembangunan industri militernya sendiri, menghasilkan berbagai jenis persenjataan seperti tank, mobil pengangkut berlapis baja, peluru rudal, jet tempur, dan kapal selam. Iran kini memiliki kapabilitas untuk menjadi eksportir persenjataan, menjual produk-produk militer ke negara-negara yang bersedia membelinya. Persenjataan ini diekspor ke negara-negara yang bersedia membeli persenjataan Iran seperti.

Tabel 3. Negara Importir Persenjataan Iran sejak Revolusi 1979 (Dalam Juta Dollar AS)

No.	Negara	Total Penjualan
1	Suriah	310
2	Iraq	33
3	Sudan	29
4	Lebanon	22

Sumber: The World (2016)

Selain negara, kelompok bersenjata seperti Hamas di Palestina dan Houthi di Yaman juga menjadi importir persenjataan dari Iran secara ilegal. Iran telah dituduh menyelundupkan senjata kepada kelompok-kelompok ini, seperti yang terjadi pada penyitaan senjata oleh angkatan laut Amerika Serikat pada 25 November 2019, termasuk rudal anti-jelajah kapal, rudal serangan darat, dan lainnya yang ditujukan untuk Houthi (U.S. Institute of Peace, 2019). Kelompok Hamas juga diketahui menggunakan amunisi persenjataan produksi Iran (Ebrahim, 2023).

Merenggangnya hubungan antara Amerika Serikat dan Iran setelah revolusi Islam 1979 mendorong Iran untuk mengembangkan industri militernya sendiri, yang memungkinkan negara tersebut untuk menjadi eksportir senjata. Persaingan ini meningkatkan kekhawatiran Amerika Serikat terhadap pasar senjatanya, terutama karena Iran juga menjalin hubungan perdagangan senjata dengan Irak dan Lebanon.

Amerika Serikat, sebagai kekuatan global, memiliki kekuasaan untuk mengusulkan embargo senjata terhadap negara-negara yang dianggap sebagai ancaman. Pada 2007, Dewan Keamanan PBB memberlakukan sanksi embargo terhadap Iran melalui resolusi No. 1747. Namun, embargo ini dicabut pada 2015 seiring dengan kesepakatan JCPOA, memungkinkan Iran untuk kembali membeli dan menjual senjata tanpa batasan hukum. Pencabutan sanksi ini memicu Amerika Serikat untuk mengusulkan perpanjangan embargo pada 2020 dan memberlakukan kebijakan baru yang mengancam sanksi terhadap pihak-pihak yang berbisnis senjata dengan Iran.

Perpanjangan embargo ini dimotivasi oleh kekhawatiran Amerika Serikat akan dampak dari perkembangan industri senjata Iran terhadap pasar senjatanya dan perekonomian nasionalnya. Amerika Serikat melihat ini sebagai langkah untuk melindungi posisinya sebagai eksportir senjata terbesar dunia dan menjaga kestabilan pasar senjata internasional.

Favorable World Order: Mengamankan Posisi Amerika Serikat dalam Politik Kawasan Timur Tengah

Amerika Serikat mengajukan perpanjangan embargo senjata terhadap Iran pada tahun 2020 dengan alasan kepentingan politik dan ekonomi, khususnya dalam menjaga stabilitas di kawasan Timur Tengah. Keterlibatan Amerika Serikat di Timur Tengah dimulai setelah Perang Dunia II dengan Doktrin Truman, yang bertujuan membendung komunisme dan pemerintahan totaliter, termasuk di Timur Tengah (Office of The Historian, 1947). Amerika Serikat membentuk aliansi dengan negara-negara Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Israel, untuk menjaga stabilitas dan kerjasama, terutama di bidang energi dan militer. Keterlibatan ini juga mencakup dukungan dalam konflik seperti perang proksi di Yaman dan Suriah.

Pada konflik Suriah, Amerika Serikat mendukung kelompok pemberontak Free Syrian Army dengan persenjataan untuk melawan pemerintah Suriah (Shannon, 2013). Di Yaman, Amerika Serikat berkolaborasi dengan Arab Saudi melalui Joint Planning Cell (JPC) untuk memberikan dukungan militer dan intelijen kepada pemerintah Yaman melawan kelompok Houthi (Reuters, 2015). Konflik di Suriah dan Yaman yang terus bereskalasi menarik keterlibatan negara lain, termasuk Iran. Dalam kedua konflik tersebut, Iran berperan sebagai lawan Amerika Serikat dan sekutunya dengan mendukung pihak-pihak yang berseberangan dengan kepentingan AS. Di Suriah, Iran mendukung pemerintah Bashar al-Assad, sementara di Yaman, Iran mendukung kelompok Houthi melawan pemerintah Yaman yang didukung oleh koalisi yang dipimpin Arab Saudi dan didukung oleh Amerika Serikat.



Gambar 1. Peta Aliansi Amerika Serikat-Iran di Kawasan Timur Tengah

Sumber: Shelton, 2020.

Gambar di atas menunjukkan aliansi politik di Timur Tengah, di mana Amerika Serikat memiliki hubungan dekat dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Israel. Sementara itu, Iran mendukung pihak-pihak yang berlawanan dengan Amerika Serikat, seperti Suriah, kelompok Houthi di Yaman, dan Hamas di Palestina (U.S Department of State, 2020). Iran telah menjalin hubungan erat dengan Suriah sejak Revolusi Iran 1979, memberikan dukungan berupa senjata, pelatihan, dan bantuan politik selama konflik Suriah. Di Yaman, Iran mendukung kelompok Houthi dengan pasokan militer seperti drone dan peralatan ranjau darat serta laut untuk melawan pemerintah Yaman yang didukung oleh Arab Saudi (CSIS, 2021).

Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran memicu konfrontasi dan perang proksi di Timur Tengah. Amerika Serikat khawatir hal ini akan mengancam posisinya di kawasan tersebut. Oleh karena itu, AS keluar dari perjanjian JCPOA dan mengusulkan perpanjangan embargo senjata terhadap Iran di DK PBB pada tahun 2020 sebagai upaya untuk membatasi pengaruh Iran dan melindungi kepentingan geopolitik AS di Timur Tengah.

Amerika Serikat dan Iran adalah dua negara dengan ideologi politik dan sosial yang sangat berbeda, yang mencerminkan latar belakang sejarah, budaya, dan agama masing-masing. Perbedaan ideologi ini mempengaruhi tidak hanya cara kedua negara mengatur rakyatnya, tetapi juga bagaimana mereka berinteraksi dengan dunia luar. Amerika Serikat, dengan demokrasi liberalnya yang menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia, dan sekularisme, sering mendorong nilai-nilai ini dalam kebijakan luar negeri. Sebaliknya, Iran sebagai republik Islam dengan sistem teokrasi dan kontrol negara yang kuat, sering kali menekankan kedaulatan nasional dan menolak pengaruh Barat.

Amerika Serikat sangat menghargai demokrasi, kebebasan individu, dan pasar bebas dan sering kali mengedepankan nilai-nilai ini dalam kebijakan luar negerinya. Hal ini dibuktikan dengan dukungan Amerika Serikat terhadap demokrasi dan hak asasi manusia di seluruh dunia. Sebaliknya, Iran dengan ideologi Republik Islamnya, sering kali mengambil sikap yang berlawanan, menekankan kedaulatan nasional dan penolakan terhadap pengaruh Barat yang dianggap merusak nilai-nilai Islam. Ketegangan dan perbedaan ideologi ini mempengaruhi hubungan internasional kedua negara, terutama dalam isu-isu seperti konflik di Timur Tengah dan program nuklir Iran. Hal ini juga menyatakan bahwa perbedaan ideologi ini secara tidak langsung mempengaruhi kepentingan nasional Amerika Serikat dan alasan perpanjangan embargo senjata terhadap Iran oleh Amerika Serikat dianggap sebagai ancaman tingkat perifer.

4. KESIMPULAN

Amerika Serikat memainkan peran penting dalam menghambat pengembangan nuklir Iran, terutama melalui pemberlakuan sanksi dan embargo yang disahkan oleh Dewan Keamanan PBB (DK PBB). Langkah-langkah ini bertujuan untuk mencegah Iran memperoleh bahan dan teknologi yang dapat digunakan untuk pengembangan senjata nuklir. Selain itu, Amerika Serikat juga turut serta dalam pembentukan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada tahun 2015, yang membatasi kemampuan Iran dalam mengembangkan nuklir. Namun, pada tahun 2018, pemerintahan Donald Trump menarik diri dari JCPOA, dengan alasan bahwa perjanjian tersebut tidak cukup kuat untuk menghentikan ambisi nuklir Iran.

Pada tahun 2020, Amerika Serikat mengajukan perpanjangan sanksi embargo terhadap Iran dengan empat alasan utama: defense of homeland, economic well-being, favorable world order, dan promotion of values. Pertama, AS melihat pengembangan nuklir Iran sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional dan sekutunya. Kedua, perkembangan industri senjata Iran dianggap mengancam dominasi pasar senjata internasional AS. Ketiga, AS berupaya membatasi pengaruh Iran di Timur Tengah untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih menguntungkan bagi kepentingan geopolitik-nya. Terakhir, AS ingin mempromosikan nilai-nilai ideologi Barat di Timur Tengah, yang sering kali bertentangan dengan ideologi Iran. Alasan-alasan ini mendasari keputusan AS untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran pada tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Matthew B. Miles, Michael Huberman. "Qualitative Data Analysis" Sage Publication, California, 1994. Sumber Internet Artikel
- ArmsExportControlAct,2022,<https://www.govinfo.gov/content/pkg/COMPS1061/pdf/COMPS-1061.pdf>,
- Center for Strategic and International Studies, "The Iranian and Houthi War Against Saudi Arabia", 21 Desember 2021
- <https://www.csis.org/analysis/iranian-and-houthi-war-against-saudi-arabia> Ebrahim, Nadeen. " Hamas and Iran Are Longtime Allies. Did Tehran Help With Its Attack on Israel?" CNN, 10 Oktober 2023, <https://edition.cnn.com/2023/10/09/middleeast/hamas-iran-israel-attack-analysis-intl/index.html>
- Morello, Carol dan DeYoung, Karen. "U.S. Officially Moves to Trigger Sanctions 'Snapback' Against Iran Despite Opposition at U.N.", The Washington Post, 20 Agustus 2020https://www.washingtonpost.com/national-security/us-officially-moves-to-trigger-sanctions-snapback-against-iran/2020/08/20/3a9e6148-e317-11ea-ade1-28daf1a5e919_story.html
- Nichols, Michelle. "Explainer: The U.S. Push to Extend U.N. Arms Embargo on Iran. 12 Agustus 2020.<https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-un-arms-explainer-idUSKCN25822Z>
- Nuechterlein, Donald E. "U.S. National Interests and Policies in the Middle East," 24 Maret 2011, <http://donaldulechterlein.com/2011/2011.03.lecture.html>.
- Office of The Historian, "The Truman Doctrine, 1947", <https://history.state.gov/milestones/1945-1952/truman-doctrine>
- Reuters, "U.S. Authorizes Logistical, Intelligence Support to Saudi Operation in Yemen", 26 Maret 2015, <https://www.reuters.com/article/yemen-security-white-house-idUSL2N0WS04U20150326>
- Shah, Anup, "The Arms Trade is Big Business", Global Issues, 5 Januari 2013 <https://www.globalissues.org/article/74/the-arms-trade-is-big-business#GovernmentMilitaryBudgetsandSpending>
- Statista, "U.S. Arms Exports in 2022, by Country", 2022, <https://www.statista.com/statistics/248552/us-arms-exports-by-country/>
- Stockholm International Peace Research Institute "UN Arms Embargo on Iran" 7 April 2021. https://www.sipri.org/databases/embargoes/un_arms_embargoes/iran
- The Guardian, "Iran's Latest Reported Ballistic Missile Firing Tests Prior US Warnings", 8 Maret 2016, <https://www.theguardian.com/world/2016/mar/08/iran-ballistic-missile-test-us-un-response>
- The World, "Where Did Iran Get Its Military Arms Over the Last 70 Years?", 1 Juni 2016, <https://theworld.org/stories/2016-06-01/where-did-iran-get-its-military-arms-over-last-70-years>
- United States Department of State, "Country Reports on Terrorism 2020: Iran", 2020, <https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2020/iran/>
- United States Institute of Peace, "U.S. Interdicts Iranian Arms to Yemen", 5 December 2019, <https://iranprimer.usip.org/blog/2019/dec/05/us-interdicts-iranian-arms-yemen>